

TABEL MASTER TEMUAN

Analisis Framing Media Online: Konflik Mutasi ASN Bupati & Wakil Bupati Sidoarjo

Detik.com · Kompas.com · Suara Surabaya | 17–26 September 2025

Achmad Arfan Hanafi · Universitas Muhammadiyah Sidoarjo · 2025

A. Detik.com 6 Berita | 17–24 September 2025 | Frame Utama: Konflik Personal Dua Individu

Detik.com menerbitkan 6 berita dalam corpus dengan pola framing yang bergerak secara bertahap dari konflik dramatik-personal (D1/D2) melalui counter-frame legitimasi (D3), kembali ke eskalasi (D4/D5), hingga konflik formal (D6). Meski kronologi peristiwa bergerak menuju ranah administratif-formal, cara Detik mendefinisikan inti persoalan (*define problems*) tetap konsisten : sengketa antarpribadi antara Subandi dan Mimik, bukan kegagalan sistem.

D1 17 September 2025 — Konflik Mulai Muncul: Mutasi ASN diposisikan sebagai pemicu memanasnya hubungan. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8117023/konflik-bupati-vs-wabup-sidoarjo-memanas-lagi-imbas-mutasi-60-asn/amp	
Analisis Judul	Kata "Vs" membangun framing duel personal antara dua pejabat. "Memanas Lagi" mengisyaratkan eskalasi dari ketegangan lama, bukan insiden baru. "Imbas" menempatkan mutasi ASN hanya sebagai pemicu, bukan masalah utama.
Define Problems	Konflik personal berlapis : mutasi ASN hanya puncak dari ketidakharmonisan yang belum terselesaikan, termasuk dugaan perbuatan melawan hukum oleh staf pribadi Bupati yang tidak ditindaklanjuti. » "Jawaban investigasi belum ada, ternyata mutasi sudah dipaksakan jalan."
Diagnose Causes	Dua penyebab parallel : (1) Bupati memaksakan mutasi tanpa menginformasikan Mimik selaku pengarah TPK; (2) staf pribadi Bupati disebut mengambil alih kewenangan TI di BKD secara paksa tanpa investigasi. » "Spri tersebut mengambil alih secara paksa tugas dan kewenangan pengelolaan teknologi informasi di BKD Sidoarjo."
Make Moral Judgment	Bupati digambarkan mengabaikan Wabup dan tidak merespons dugaan pelanggaran stafnya sendiri. Mimik diposisikan sebagai pihak yang dirugikan dan sudah bersabar. » "Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak mau lagi ada toleransi."
Treatment Recommendation	Tidak ada rekomendasi eksplisit redaksi. Implisit: investigasi yang diminta Mimik seharusnya direspons Bupati; TPK seharusnya tidak membiarkan pengarahnya tanpa informasi. —
Analisis Narasumber	Mimik Idayana: 4 kutipan (dominan, emosional & tegas) BKN Surabaya (Basuki AW): 1 kutipan (validasi administratif) Bupati Subandi: 1 kutipan (prosedural di sambutan pelantikan saja)
D2 17 September 2025 — Bupati Sidoarjo Mutasi 60 ASN, Wakil Bupati Tak Terima!	

<https://news.detik.com/berita/d-8117107/bupati-sidoarjo-mutasi-60-asn-wakil-bupati-tak-terima>

Analisis Judul	Tanda seru (!) memperkuat nuansa dramatis-emosional. Struktur kalimat: Bupati sebagai subjek aktif ("memutasi"), Wabup sebagai pihak yang bereaksi negatif ("Tak Terima"). Framing: ada yang memutuskan sepihak, ada yang menolak.
Define Problems	Tindakan sepihak Bupati yang mengabaikan hak Wabup sebagai pengarah TPK. Mimik tidak mengetahui siapa saja pejabat yang dimutasi bahkan setelah pelantikan — informasinya justru diperoleh dari media, bukan dari Bupati. » <i>"Saya tidak tahu sama sekali siapa pejabat yang akan dimutasi. Tahunya malah dari rekan-rekan media."</i>
Diagnose Causes	Penyebab utama: Bupati Subandi mengambil keputusan tanpa komunikasi ke Wabup. Penyebab sekunder: TPK tidak merespons surat permintaan progres kinerja yang dikirim Mimik sehari sebelum pelantikan. » <i>"Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK."</i>
Make Moral Judgment	Mimik diposisikan sebagai pihak yang dirugikan dan berhak kecewa. Subandi tidak diberi ruang membela diri — seluruh narasi dibangun dari perspektif Mimik. Framing moral condong kuat ke Mimik. » <i>"Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu."</i>
Treatment Recommendation	Implisit: TPK seharusnya melaporkan progres kepada seluruh anggota pengarah sebelum pelantikan. Tidak ada rekomendasi eksplisit dari redaksi tentang langkah penyelesaian konflik. —
Analisis Narasumber	Mimik Idayana: 3 kutipan (satu-satunya narasumber aktif) Bupati Subandi: 1 kutipan (hanya kutipan sambutan pelantikan, tidak diberi ruang merespons keberatan Mimik)

D3 18 September 2025 - Mutasi Pejabat Sidoarjo Pemicu Konflik Subandi-Mimik Sudah Sesuai Aturan
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-8117871/mutasi-pejabat-sidoarjo-pemicu-konflik-subandi-mimik-sudah-sesuai-aturan>

Analisis Judul	Berbeda total dari D1/D2 — tidak ada kata emosional atau dramatik. "Sudah Sesuai Aturan" menempatkan simpulan sebagai fakta pasti di judul sebelum isi dibaca. Framing penutupan kontroversi: masalah sudah selesai secara prosedural.
Define Problems	Masalah didefinisikan ulang: bukan lagi soal pengabaian Wabup, melainkan kesalahpahaman prosedur. BKN hadir sebagai otoritas yang menutup pertanyaan prosedural — framing bergeser dari "ada yang salah" menjadi "semuanya sudah benar secara aturan". » <i>"Mutasi perdana pejabat Pemkab Sidoarjo yang sebelumnya memicu konflik antara Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana dipastikan sudah sesuai aturan."</i>
Diagnose Causes	Penyebab konflik digeser dari tindakan Bupati ke ketidakpahaman prosedur secara umum. BKN memvalidasi seluruh tahapan — implikasinya, jika ada yang mempersoalkan, itu berasal dari ketidaktahuan, bukan pelanggaran nyata. » <i>"Yang jelas kami tidak akan memberikan izin jika tahapan-tahapan atau syarat-syaratnya itu tidak dilengkapi."</i>
Make Moral Judgment	Penilaian moral berbalik drastis vs D1/D2. Subandi secara implisit direhabilitasi via BKN. Mimik tidak hadir sama sekali — berita berjalan satu arah tanpa ruang bantahan, penilaian moral menjadi asimetris pro-Bupati.

	» "Diketahui Bupati, Wakil Bupati, maupun Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN." [Subandi — tidak terbantahkan dalam berita ini]
Treatment Recommendation	Implisit: percayakan proses kepada kewenangan Bupati selaku PPK dan BKN sebagai otoritas kepegawaian. Tidak ada desakan evaluasi prosedur internal TPK atau dialog antara dua pihak. » "Itu kewenangan bupati atau wali kota selaku PPK."
Analisis Narasumber	BKN Surabaya (Basuki AW): 3 kutipan (dominan, satu-satunya aktif, legitimator prosedural) Bupati Subandi: 2 kutipan (memperkuat klaim BKN) Mimik Idayana: 0 kutipan — tidak hadir sama sekali, berita menjadi asimetris
D4 22 September 2025 - 6 Fakta Baru Panasnya Konflik Bupati Subandi Vs Mimik Buntut Mutasi ASN https://www.detik.com/jatim/berita/d-8123834/6-fakta-baru-panasnya-konflik-bupati-subandi-vs-mimik-buntut-mutasi-asn	
Analisis Judul	Format listicle "6 Fakta" memperkuat pendekatan episodik-dramatik — konflik dikemas sebagai konten serial. "Panas" dan "Baru" menciptakan urgensi klik. "Vs" kembali hadir, menegaskan framing duel personal yang konsisten sejak D1.
Define Problems	Pelanggaran berlapis: bukan hanya soal jumlah ASN yang melebihi kesepakatan, tetapi juga objektivitas penilaian kinerja — ada ASN berkinerja baik yang justru dipindah atau tidak dilantik. » "Saya sangat menyayangkan karena kesepakatan awal hanya untuk 31 ASN, tapi tiba-tiba jumlahnya menjadi 61 orang. Penambahan itu tidak pernah diberitahukan kepada saya selaku tim pengarah dalam TPK."
Diagnose Causes	Dua penyebab paralel: (1) Bupati melanggar kesepakatan awal soal jumlah ASN; (2) BKN hanya memverifikasi data teknis, tidak memantau tahapan pembahasan internal TPK — ada celah prosedural yang tidak tercover. » "BKN hanya memastikan data sesuai, tapi prosesnya tidak melalui tahapan sebagaimana mestinya."
Make Moral Judgment	Mimik diposisikan berpegang pada regulasi konkret (PP No. 20/2019, UU No. 20/2023). Subandi hanya hadir dengan klaim "sudah sesuai aturan" tanpa elaborasi — secara naratif Mimik tampil lebih kredibel & berbasis hukum. » "Ini jelas melanggar PP Nomor 20 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil."
Treatment Recommendation	Pertama kali muncul rekomendasi eksplisit di Detik.com: laporan ke Kemendagri sebagai jalur penyelesaian yang sah. Menandai pergeseran dari peliputan eskalasi semata ke peliputan tindakan formal. » "Jelas ada pelanggaran mekanisme... saya akan melaporkan masalah ini ke Kementerian Dalam Negeri agar sistem di Sidoarjo diluruskan kembali."
Analisis Narasumber	Mimik Idayana: 6 kutipan (sangat dominan, setiap dari 6 "fakta" didominasi perspektifnya) Bupati Subandi: 2 kutipan (hanya di fakta ke-6 sebagai bantahan, porsi jauh lebih kecil)
D5 22 September 2025 - Wabup Sidoarjo Bakal Laporkan Bupati ke Kemendagri Buntut Mutasi 60 ASN https://news.detik.com/berita/d-8123941/wabup-sidoarjo-bakal-laporkan-bupati-ke-kemendagri-buntut-mutasi-60-asn/amp	

Analisis Judul	Wabup sebagai subjek aktif ("Bakal Laporkan") dan Bupati sebagai objek — pertama kalinya posisi ini terbalik. "Buntut" menempatkan laporan sebagai konsekuensi langsung dari mutasi.
Define Problems	Ketegangan dua kubu kini mengarah ke jalur formal — konflik bukan lagi sekadar protes internal, melainkan berpotensi menjadi sengketa administratif yang melibatkan Kemendagri. » <i>"Konflik antara Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana dan Bupati Subandi semakin panas."</i>
Diagnose Causes	Bupati sebagai aktor utama penyebab: penambahan jumlah ASN yang dimutasi dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Mimik selaku pengarah TPK — ditegaskan kembali secara eksplisit. » <i>"Penambahan itu tidak pernah diberitahukan kepada saya selaku tim pengarah dalam TPK (Tim Penilai Kinerja)."</i>
Make Moral Judgment	Kedua suara diberi ruang, namun narasi pembuka dan struktur menempatkan Mimik sebagai pihak yang bereaksi atas pelanggaran — bukan sebagai penyerang. Subandi hanya hadir dengan pernyataan defensif standar tanpa argumen baru. » <i>"Mutasi ini sudah sesuai aturan. Mekanismenya memang dari BKN. Kalau ada yang bilang tidak sah, ya ada stakeholder-nya."</i>
Treatment Recommendation	Implisit: laporan ke Kemendagri adalah langkah wajar & sah sebagai respons atas dugaan pelanggaran prosedur. Berita berakhir tanpa resolusi, memperkuat narasi konflik yang masih akan berlanjut. —
Analisis Narasumber	Mimik Idayana: 2 kutipan (narasumber utama, mendominasi narasi) Bupati Subandi: 1 kutipan (penyeimbang di akhir, defensif & repetitif dari berita sebelumnya)
D6 24 September 2025 - Wabup Mimik Resmi Laporkan Bupati Sidoarjo ke Kemendagri soal Mutasi 61 ASN https://news.detik.com/berita/d-8129339/wabup-mimik-resmi-laporkan-bupati-sidoarjo-ke-kemendagri-soal-mutasi-61-asn	
Analisis Judul	"Resmi" menjadi penanda kunci — konflik yang sebelumnya pernyataan publik kini naik ke tindakan hukum formal. Wabup sebagai subjek bertindak, Bupati sebagai objek yang dilaporkan. Judul paling tegas secara posisi moral dari 6 berita Detik.
Define Problems	Masalah bergeser ke sengketa administratif formal — Kemendagri kini menjadi arena penyelesaian. Pelanggaran kesepakatan ditekankan eksplisit: 61 ASN dimutasi, padahal hanya disepakati untuk mengisi jabatan kosong di sejumlah OPD. ⚠ Catatan Verifikasi: angka basis "36 OPD" (dikutip dari jubi Wabup, Sigit IB, pada 24-25/9) berbeda dari "31 jabatan" yang dikutip langsung dari Mimik pada 21-22/9 (lihat D4, S4). Tidak ada media yang mengklarifikasi inkonsistensi ini. » <i>"Yang disepakati hanya mengisi posisi kosong di 36 OPD. Tapi yang dimutasi sampai 61 orang. Ini jelas melampaui kewenangan yang seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu."</i>
Diagnose Causes	Penyebab ditegaskan paling eksplisit: Bupati "melampaui kewenangan" — lebih keras dari framing "tidak memberitahu" di berita-berita sebelumnya. » <i>"Ini jelas melampaui kewenangan yang seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu."</i>
Make Moral Judgment	Mimik dan tim ahlinya diposisikan sebagai pihak yang menempuh jalur resmi & patuh hukum. Bupati tidak hadir sama sekali — penilaian moral sepenuhnya dibangun dari perspektif pihak pelapor. » <i>"Harapan kami, Kemendagri bisa turun langsung ke Sidoarjo untuk memeriksa proses mutasi ini. Mutasi harus sesuai dengan UU yang berlaku."</i>

Treatment Recommendation	Rekomendasi paling eksplisit & kuat di antara seluruh berita Detik: Kemendagri diminta turun langsung ke Sidoarjo. Satu-satunya berita yang merekomendasikan intervensi otoritas pusat secara tegas & konkret. » "Harapan kami, Kemendagri bisa turun langsung ke Sidoarjo untuk memeriksa proses mutasi ini."
Analisis Narasumber	Sigit Imam Basuki (jubir/tenaga ahli Wabup): 3 kutipan (narasumber utama, representasi pihak pelapor) Mimik Idayana: 0 kutipan langsung (tindakannya jadi objek utama berita) Bupati Subandi: 0 kutipan — tidak hadir sama sekali, tidak diberi ruang klarifikasi

B. Kompas.com 3 Berita | 25–26 September 2025 | Frame Utama: Kegagalan Struktural Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kompas.com menerbitkan 3 berita dengan pola framing yang progresif: dari konflik politik yang meruncing (K1) ke analisis akar struktural melalui pakar (K2) hingga berorientasi solusi via partai pengusung (K3). Kompas adalah satu-satunya media yang tidak mengutip Bupati Subandi secara langsung di satu pun beritanya dan satu-satunya yang memberikan rekomendasi bersifat reformasi kelembagaan jangka panjang.

K1 25 September 2025 - Konflik Bupati dan Wabup Sidoarjo Meruncing, Mimik Berencana Laporkan Subandi ke Kemendagri https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/25/065231978/konflik-bupati-dan-wabup-sidoarjo-meruncing-mimik-berencana-laporkan	
Analisis Judul	Tidak ada format "Vs" seperti Detik. "Meruncing" = eskalasi bertahap dari kondisi yang sudah ada — bukan insiden baru. "Berencana Laporkan" = tindakan terencana & rasional, bukan reaktif emosional. Judul lebih dingin & deskriptif, orientasi prosedural.
Define Problems	Ketidakharmonisan kepemimpinan yang bersifat struktural & berlapis — bukan konflik tiba-tiba. Kompas menelusuri akar konflik hingga Maret 2025, menjadikannya akumulasi ketegangan yang sudah lama membara. » "Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi dan Mimik Idayana, belum genap satu tahun. Tetapi, keduanya telah beberapa kali diwarnai isu tak harmonis."
Diagnose Causes	Dua level: (1) perilaku Bupati yang berulang kali mengabaikan posisi Mimik sejak Maret 2025; (2) dinamika koalisi lintas partai yang hanya berorientasi kemenangan, bukan visi bersama. » "Baru satu bulan dilantik, tepatnya pada Maret 2025, Subandi pernah menyebut tugas dewan menghambur-hamburkan uang rakyat... fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo menolak permintaan maaf Subandi."
Make Moral Judgment	Tidak diarahkan eksplisit ke satu pihak. Namun Subandi lebih sering menjadi subjek pernyataan yang memancing reaksi negatif. Kompas juga memuat bantahan Mimik atas isu ketidakharmonisan — upaya penyajian lebih berimbang. » "Hoaks, seng retak iku sopo sih (siapa sih yang retak). Media sendiri (yang menggoreng). Saya bersama Pak Subandi sudah berkomitmen..." [Mimik, 25 Juni 2025]
Treatment Recommendation	Implisit: perlu perbaikan pola komunikasi & relasi kepemimpinan secara menyeluruh, bukan hanya penyelesaian satu insiden mutasi. —

Analisis Narasumber	Mimik Idayana: 2 kutipan (dua konteks waktu berbeda — Juni & September) Bupati Subandi: 0 kutipan langsung (hanya dirujuk via narasi redaksi & pernyataan pihak lain) Pakar: 0 — analisis struktural disajikan via narasi redaksi sendiri
K2 25 September 2025 - Bupati-Wabup Sidoarjo Berkonflik, Pakar: Koalisi Hanya Berorientasi Kemenangan Mudah Retak https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/25/163130078/bupati-wabup-sidoarjo-berkonflik-pakar-koalisi-hanya-berorientasi	
Analisis Judul	Struktur dua bagian dipisah koma: fakta peristiwa + langsung analisis pakar. Kompas tidak berhenti di pelaporan, langsung menawarkan kerangka penjelasan. "Koalisi Hanya Berorientasi Kemenangan" = penyebab pada sistem politik, bukan individu.
Define Problems	Jauh melampaui peristiwa mutasi ASN — ini adalah gejala sistem politik lokal yang sakit. Mutasi ASN hanya titik ledak dari akumulasi masalah yang lebih dalam : koalisi rapuh, posisi wabup lemah secara hukum, persaingan akses sumber daya birokrasi. » <i>"Ken Bimo menduga bahwa masalah mutasi ASN hanyalah puncak dari masalah yang lebih dalam antara keduanya."</i>
Diagnose Causes	Dua faktor struktural eksplisit dari pakar: (1) koalisi Pilkada dibangun hanya untuk menang, bukan visi bersama; (2) posisi wakil bupati secara struktural lemah menurut UU — konflik hampir tak terhindarkan saat ada perbedaan kepentingan. » <i>"Koalisi yang terbentuk saat Pilkada umumnya hanya berorientasi pada kemenangan, bukan visi jangka panjang. Begitu jawaban diperoleh, otomatis koalisi mudah retak."</i>
Make Moral Judgment	Penilaian moral tidak diarahkan ke individu, melainkan ke sistem. Mimik diposisikan sebagai korban struktur yang lebih besar. Masyarakat diposisikan sebagai pihak yang akan menanggung akibat (potensi hilangnya kepercayaan publik). » <i>"Ketika tidak dilibatkan, otomatis ada semacam konflik personal dengan bupati yang mungkin tidak bisa dihindari."</i>
Treatment Recommendation	Rekomendasi paling komprehensif dalam seluruh corpus: (1) partai pengusung menjaga stabilitas; (2) Kemendagri memastikan tata kelola ASN; (3) reformasi kelembagaan posisi wabup; (4) transparansi & akuntabilitas pengambilan keputusan. » <i>"Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan harus ditegakkan agar birokrasi tidak terbebas dari tarik menarik kepentingan elite."</i>
Analisis Narasumber	Ken Bimo Sultoni (Pakar Politik Unesa): 6 kutipan (tunggal & sangat dominan — seluruh analisis dibangun di atas perspektifnya) Mimik Idayana: 0 kutipan (hanya dirujuk dalam analisis Ken Bimo) Bupati Subandi: 0 kutipan (keduanya objek analisis, bukan narasumber aktif)
K3 26 September 2025 - Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/26/203557378/tengahi-konflik-subandi-mimik-sidoarjo-parpol-pengusung-dinilai-perlu-turun	
Analisis Judul	"Tengahi" — satu-satunya judul dalam seluruh corpus 3 media yang berorientasi solusi sejak judul, bukan eskalasi/drama. "Dinilai Perlu Turun Tangan" = partai pengusung sebagai aktor solusi yang ditunggu — framing resolusi.
Define Problems	Bukan lagi konflik dua individu, melainkan ancaman nyata terhadap fungsi pemerintahan & kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat Sidoarjo — pergeseran framing paling jauh dari seluruh berita Kompas.

	» "Sebab, jika terjadi berkepanjangan, akan mengganggu pelayanan masyarakat Sidoarjo."
Diagnose Causes	Bergeser dari level individu ke level regulasi: ketidakharmonisan sebagian besar disebabkan ketidakjelasan tupoksi wakil bupati dalam UU No. 23 Tahun 2014 — celah regulasi yang membuat posisi Mimik struktural rentan diabaikan. » "Tugas wakil bupati secara resmi diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yakni wasdalbin (pengawasan, pengendalian, dan pembinaan)."
Make Moral Judgment	Diarahkan sepenuhnya kepada dampak yang ditanggung masyarakat — bukan kepada salah satu pejabat. Masyarakat Sidoarjo sebagai pihak paling dirugikan. Framing paling jauh dari penilaian personal dalam seluruh corpus. » "Maka ketika hubungan itu tidak harmonis, maka tentu saja, akan mengganggu terhadap kepemimpinan keduanya, dan tentu itu masyarakat sangat dirugikan."
Treatment Recommendation	Eksplisit & praktis: partai pengusung (Gerindra, Golkar, Demokrat) & tokoh masyarakat diminta segera menjadi mediator; dialog & kompromi adalah syarat mutlak keberlangsungan pemerintahan. » "Tentu yang bisa mendamaikan ya partai pengusung, yang bisa mengajak mereka berbicara."
Analisis Narasumber	Abdul Chalik (Pakar Politik Lokal UINSA Surabaya): 4 kutipan (tunggal & dominan — menekankan dampak publik & peran partai sebagai mediator) Mimik Idayana: 0 kutipan (hanya disebut dalam konteks pelaporan ke Kemendagri) Bupati Subandi: 0 kutipan (tidak diberi ruang merespons/membela diri)

C. Suara Surabaya 4 Berita | 18–22 September 2025 | Frame Khas: Dualitas Genre (Berimbang + Tegas Menghakimi)

Suara Surabaya menerbitkan 4 berita dengan komposisi unik: 3 straight news (SS1/SS2/SS4) yang relatif berimbang & informatif, plus 1 editorial redaksi (SS3) yang eksplisit, metaforis, dan menghakimi kedua pemimpin. Dualitas genre ini adalah temuan yang tidak ditemukan di Detik maupun Kompas. Frame 'ancaman nyata terhadap pelayanan publik' yang disebutkan di abstrak penelitian paling eksplisit muncul di SS3 (editorial), bukan di straight news.

SS1 18 September 2025 - Hubungan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo Disinyalir Memanas Pasca-Mutasi 60 ASN https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/hubungan-bupati-wakil-bupati-sidoarjo-disinyalir-memanas-pasca-mutasi-60-asn/	
Analisis Judul	"Disinyalir" = dugaan, bukan fakta pasti — berbeda dari Detik yang langsung "Tak Terima!" sebagai fakta. Subjek: "Hubungan Bupati-Wakil Bupati" (jabatan/relasi kelembagaan), bukan nama personal "Subandi Vs Mimik". "Pasca-Mutasi" = mutasi sebagai pemicu, hubungan sebagai dampaknya.
Define Problems	Memanasnya relasi kelembagaan Bupati-Wabup akibat proses mutasi yang dinilai cacat prosedur, sekaligus isu lain yang belum tuntas (dugaan pelanggaran kewenangan staf pribadi Bupati). Dua isu disajikan sebagai satu paket masalah yang saling terkait. » "Meski demikian, pelantikan itu disinyalir membuat hubungan antara Subandi dengan Mimik Idayana Wakil Bupati Sidoarjo memanas."
Diagnose Causes	Dua tingkat: (1) TPK tidak merespons surat permintaan progres kinerja Mimik; (2) berita juga secara berimbang menghadirkan klarifikasi BKN bahwa proses sudah lengkap secara administratif. » "Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK."

Make Moral Judgment	Relatif berimbang: Subandi, Mimik, dan BKN diberi ruang. Urutan naratif (Subandi jelaskan dasar hukum → Mimik kritik prosedur → BKN tegaskan proses sesuai) secara halus memberi "kata akhir" pada legitimasi Bupati. » <i>"Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak mau lagi ada toleransi."</i>
Treatment Recommendation	Tidak ada rekomendasi eksplisit. Berfungsi sebagai pemetaan posisi awal dari tiga pihak (Bupati, Wabup, BKN) tanpa mengarahkan pembaca ke kesimpulan tertentu — informatif murni. —
Analisis Narasumber	Mimik Idayana: 3 kutipan (porsi signifikan, tidak sebesar di Detik) Bupati Subandi: 2 kutipan (diberi ruang jelaskan dasar hukum lebih dulu — posisi naratif relatif diuntungkan) BKN Surabaya (Basuki AW): 3 kutipan (ruang besar di akhir berita, "penutup" yang menegaskan legitimasi prosedural)
SS2 19 September 2025 - Lini Masa Keretakan Hubungan Subandi-Mimik https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/lini-masa-keretakan-hubungan-subandi-mimik/	
Analisis Judul	"Lini Masa" = format timeline/kronologis, bukan straight news satu peristiwa. "Keretakan" = penegasan kepastian bahwa hubungan memang retak — pergeseran dari "Disinyalir" di SS1 ke kepastian di SS2, meski terbit hari yang sama.
Define Problems	Pola ketidakharmonisan yang berulang & terdokumentasi sejak awal kepemimpinan — bukan insiden tunggal. Timeline Februari-September 2025 membangun argumen bahwa konflik mutasi ASN adalah klimaks dari rangkaian friksi 7 bulan. » <i>"Dengan serangkaian kejadian sejak Maret ini, terhitung dalam kurun waktu tujuh bulan sejak dilantik, duet Subandi–Mimik sudah dua kali diguncang isu ketidakharmonisan."</i>
Diagnose Causes	Rangkaian peristiwa saling berkaitan: pernyataan viral Subandi soal DPR (Maret) → penolakan permintaan maaf Fraksi Gerindra (Juni) → pengakuan Mimik tidak dilibatkan dalam Perbup (Juni) → mutasi 61 ASN (September). Setiap peristiwa memperkuat pola pengambilan keputusan sepihak oleh Bupati. » <i>"Jangankan saya diminta pertimbangan, diajak ngomong saja tidak. Padahal Bupati dan Wakil Bupati itu merupakan kesatuan dalam pemerintahan."</i>
Make Moral Judgment	Terbangun kumulatif melalui akumulasi peristiwa, bukan satu kutipan. Subandi diposisikan sebagai pihak berulang kali memicu kontroversi. Menariknya: inkonsistensi sikap Mimik sendiri dicatat secara objektif (membantah keretakan di Juni, mengakui kekecewaan di September) — objektivitas yang tidak ditemukan di media lain. » <i>"Jadi kesabaran saya sudah cukup. Saya tegasnya hubungan saya dengan Pak Bupati tidak baik-baik saja." [Namun sebulan sebelumnya Mimik berkata: "Tidak ada keretakan. Kami baik-baik saja."]</i>
Treatment Recommendation	Tidak ada rekomendasi eksplisit redaksi, namun mengutip seruan partai pengusung (Golkar & Gerindra Jatim) agar keduanya fokus bekerja untuk rakyat — rekomendasi tidak langsung via suara pihak ketiga. » <i>"Kami harap keduanya bisa bekerja semaksimal mungkin untuk warga Sidoarjo." [Hidayat, Waka Gerindra Jatim]</i>
Analisis Narasumber	Mimik Idayana: 5 kutipan lintas waktu Juni-September (menunjukkan evolusi sikap) Adam Rusydi (Ketua DPD Golkar Sidoarjo): 2 kutipan (perspektif partai pengusung, berusaha netral)

	Hidayat (Waka Gerindra Jatim): 1 kutipan (rekomendasi tidak langsung) Bupati Subandi: 1 kutipan (hanya kutipan viral Maret, tidak ada klarifikasi terbaru dalam timeline)
SS3 19 September 2025 - Opini Pemred — Eddy Prastyo, Editor in Chief Suara Surabaya Media - Nyala Matahari Kembar Sidoarjo Yang Membakar Rakyatnya https://www.suarasurabaya.net/catatan-pemred/2025/nyala-matahari-kembar-sidoarjo-yang-membakar-rakyatnya/	
Analisis Judul	Satu-satunya judul dalam seluruh corpus 3 media yang memakai bahasa metaforis-sastra. "Matahari Kembar" = dua kekuasaan sejajar yang saling membakar rakyatnya sebagai korban. Tidak ada nama personal di judul — fokus sepenuhnya pada dampak ke rakyat.
Define Problems	Krisis kepemimpinan yang berdampak nyata & terukur pada pelayanan publik — bukan sekadar konflik elite. Penulis menghubungkan langsung konflik politik dengan data konkret: serapan anggaran baru 41,24% (Rp950M dari Rp2,3T), proyek betonisasi tersendat, normalisasi sungai belum teruji. » "Hingga 9 September 2025, serapan pengadaan baru 41,24 persen, hanya sekitar Rp950 miliar dari pagu Rp2,3 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm bahwa banyak program publik tersendat."
Diagnose Causes	Ego & kegagalan KEDUA pemimpin bekerja sama — bukan kesalahan satu pihak. "Matahari kembar" sebagai metafora dua kekuasaan yang tidak sinkron, dikuatkan dengan kasus pembandingan Bojonegoro & Tasikmalaya (pola struktural-nasional, bukan unik Sidoarjo). » "Friksi bupati–wabup bukan semata soal dua pribadi yang berseberangan, melainkan soal moral politik. Sejauh mana mereka mau menyingkirkan ego demi tanggung jawab kepada publik?"
Make Moral Judgment	Penilaian moral PALING TEGAS & EKSPLISIT di antara seluruh 13 berita corpus. Kedua pemimpin dinilai bersama-sama gagal secara moral. Rakyat diposisikan sebagai korban nyata dengan bukti konkret (jalan berlubang, sampah menumpuk, ancaman banjir). » "Kalau tidak, pemerintahan akan terus berjalan setengah hati, dan rakyat lagi-lagi menjadi pihak yang paling dirugikan." / "Mereka sibuk saling menyalahkan, kita yang merasakan ilapnya."
Treatment Recommendation	Tuntutan moral langsung kepada kedua pemimpin untuk menyingkirkan ego & memprioritaskan pelayanan publik — disampaikan dalam bentuk pertanyaan retorik, bukan rekomendasi institusional seperti Kompas. » "Pertanyaannya sederhana: apakah warga harus menunggu kedua pemimpinnya akur dulu sebelum bisa merasakan layanan yang memang sudah menjadi hak mereka?"
Analisis Narasumber	Genre EDITORIAL — bukan straight news. Bupati Subandi & Mimik: masing-masing 2 kutipan yang direkonstruksi secara naratif (bukan verbatim wawancara baru). Data serapan anggaran 41,24% adalah elemen fakta terkuat namun sumbernya tidak disebutkan eksplisit. Kasus Bojonegoro & Tasikmalaya: 2 referensi komparatif yang memperkuat argumen pola nasional.
SS4 22 September 2025 - Mimik Akan Laporkan Prosedur Mutasi ASN ke Kemendagri, Subandi: Sudah Sesuai Aturan https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/mimik-akan-laporkan-prosedur-mutasi-asn-ke-kemendagri-subandi-sudah-sesuai-aturan/	
Analisis Judul	Judul dua bagian dengan tanda titik dua, menampilkan dua pernyataan berseberangan secara SETARA: "Mimik Akan Laporkan..." dan "Subandi: Sudah Sesuai Aturan". Judul paling seimbang secara struktural dari seluruh corpus Suara Surabaya.

Define Problems	Perbedaan jumlah & interpretasi kesepakatan — Mimik menyebut kesepakatan awal 31 jabatan, namun yang dimutasi 61 orang. Ditempatkan sebagai persoalan administratif konkret yang dapat diverifikasi. ⚠ Catatan Verifikasi: angka "31 jabatan" dikutip langsung dari Mimik pada 21-22/9 — berbeda dari "36 OPD" yang dikutip jubir Wabup pada 24-25/9 (lihat D6). Inkonsistensi ini tidak dikonfirmasi oleh media manapun. » "Dalam rotasi ASN pada Rabu (17/9/2025), sebelumnya telah disepakati bahwa pergeseran hanya untuk mengisi 31 jabatan yang kosong di sejumlah OPD... Namun menurutnya, dalam pelaksanaan, jumlahnya bertambah menjadi 61 orang."
Diagnose Causes	Dua klaim sebab-akibat BERTENTANGAN disajikan berdampingan tanpa pemihakan: Mimik (penambahan jumlah ASN tidak dikonsultasikan, melanggar UU No. 20/2023 & PP No. 20/2019) vs Subandi (sudah mendapat persetujuan BKN). Berita tidak memihak — keduanya disajikan sebagai versi masing-masing. » "Ini jelas melanggar PP Nomor 20 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS." [Mimik] / "Mutasi ini sudah sesuai aturan. Mekanismenya memang dari BKN... jadi tidak ada masalah." [Subandi]
Make Moral Judgment	Paling mendekati "cover both sides" dalam corpus Suara Surabaya. Porsi kutipan & sub-judul relatif proporsional — Subandi diberi sub-judul tersendiri "Bupati Bantah Ada Pelanggaran" yang menyamakan kedudukan argumentatif secara struktural. » "Bupati Bantah Ada Pelanggaran" [sub-judul yang secara eksplisit memberi ruang argumentasi Bupati, sejajar dengan ruang argumentasi Mimik di paragraf sebelumnya]
Treatment Recommendation	Implisit: pelaporan ke Kemendagri sebagai mekanisme verifikasi netral. Berita tidak menyimpulkan siapa yang benar — Kemendagri diposisikan sebagai pihak yang akan memverifikasi klaim mana yang akurat. —
Analisis Narasumber	Mimik Idayana: 5 kutipan (lebih besar secara jumlah, namun dikontekstualisasikan via referensi regulasi detail) Bupati Subandi: 2 kutipan (diberi sub-judul tersendiri "Bupati Bantah Ada Pelanggaran" — menyamakan kedudukan argumentatif meski porsi lebih sedikit)

D. Sintesis Komparatif per Elemen Entman Perbandingan Tiga Media

Tabel berikut membandingkan pola framing dominan ketiga media berdasarkan empat elemen Entman. Hasil temuan telah disintesis dan dilebur dengan teori komunikasi politik untuk memperkuat landasan penyusunan narasi Results and Discussion.

Elemen Entman	Detik.com	Kompas.com	Suara Surabaya
Define Problems (Pola Dominan)	Konflik personal antara dua individu (Bupati Vs Wabup) yang bergerak melalui berbagai tahap—dramatik (D1,D2,D4) lalu prosedural-formal (D3,D5,D6)—namun inti persoalan tetap dibingkai sebagai sengketa antarpribadi, bukan kegagalan sistem. Framing yang konsisten melalui penggunaan judul 'Vs', listicle drama, dan dominasi kutipan emosional ini menunjukkan adanya praktik komodifikasi konflik, di mana isu substantif mengenai tata kelola dikesampingkan demi menonjolkan jurnalisme episodik yang dramatis.	Kegagalan struktural tata kelola pemerintahan daerah: akumulasi ketegangan (K1), rapuhnya koalisi politik & lemahnya regulasi posisi wabup (K2), hingga ancaman terhadap pelayanan publik (K3). Melalui eskalasi progresif dari K1 → K2 → K3, media ini menerapkan jurnalisme kontekstual dengan sengaja melakukan depersonalisasi konflik, yakni menarik akar isu dari ranah perselisihan personal ke dalam ranah kegagalan sistemik.	Frame 'ancaman nyata pelayanan publik' hanya muncul eksplisit di SS3 (editorial) dengan paparan data konkret (serapan 41,24%), sedangkan SS1, SS2, dan SS4 relatif berimbang/informatif. Suara Surabaya adalah satu-satunya media yang memunculkan frame ini sebagai ciri khas yang membedakannya dari dua media lain. Pola ini mengonfirmasi adanya dualitas genre kelembagaan, di mana isu pelayanan publik diagresifkan di ruang editorial (opini redaksi), sementara berita harian dijaga agar tetap normatif sesuai prinsip jurnalisme komunitas.
Diagnose Causes (Pola Dominan)	Tindakan individu Bupati Subandi (mutasi sepihak, melampaui kewenangan) dijadikan sebagai penyebab utama yang konsisten di 5 dari 6 berita, dengan D3 sebagai pengecualian (penyebab digeser ke 'ketidapahaman prosedur' via BKN). Tidak ada satu pun berita yang menganalisis akar struktural. Redaksi tampak terjebak dalam	Penyebab masalah secara eksklusif dicari pada level sistem: koalisi Pilkada transaksional (K1,K2) dan kelemahan hukum posisi wabup dalam UU No. 23/2014 (K2,K3), bukan pada karakter atau perilaku individu tertentu. Pelibatan dua pakar dari dua perguruan tinggi digunakan untuk melegitimasi diagnosa	Pada SS1, SS2, dan SS4, dua versi sebab-akibat (klaim Mimik vs klaim Subandi) disajikan secara berdampingan tanpa pemihakan. SS2 bahkan mencatat inkonsistensi klaim Mimik secara objektif—sebuah praktik yang tidak ditemukan di media lain. Sementara pada SS3 (editorial), penyebab konflik ditarik pada ego dan kegagalan kedua

	jurnalisme de jure, terbukti dari pembiaran inkonsistensi data mentah (klaim kuota 31 vs 36; ASN 60 vs 61) yang sekadar disalin dari klaim elite tanpa upaya verifikasi ke data riil Pemkab Sidoarjo.	struktural ini melalui otoritas akademik, yang secara efektif memutus siklus perang opini antar-elite.	pemimpin secara bersama-sama, yang diperkuat melalui referensi komparatif kasus Bojonegoro & Tasikmalaya sebagai pola kelemahan birokrasi tingkat nasional.
Make Moral Judgment (Pola Dominan)	Bergeser tajam antar-berita dan tidak konsisten. Berita D1, D2, D4, D5, dan D6 cenderung memihak Mimik melalui dominasi narasumber yang membangun framing korban. Namun, D3 berbalik memihak Subandi melalui legitimasi BKN. Penilaian moral sangat bergantung pada narasumber mana yang mendominasi porsi berita pada hari tersebut. Ketiadaan pakar sebagai penengah membuat moral judgment terbentuk murni dari ketidakseimbangan akses elite ke media.	Cenderung tidak personal. K2 mengarahkan penilaian pada sistem (koalisi rapuh, desain politik gagal), K3 pada dampak kerugian masyarakat, sementara K1 tampil cukup berimbang dengan memuat bantahan Mimik sendiri. Dalam narasi ini, tidak ada yang diposisikan sebagai 'pahlawan' maupun 'penjahat'—melainkan sistem rekrutmen politik yang gagal dan masyarakat yang pada akhirnya menanggung akibat.	Terdapat dua mode berbeda dalam satu corpus. SS1 dan SS4 menampilkan pendekatan yang paling mendekati 'cover both sides' (porsi kutipan setara, keseimbangan sub-judul). Namun di sisi lain, SS3 (editorial) tampil paling tegas dengan menjatuhkan vonis bahwa kedua pemimpin dinilai sama-sama gagal secara moral. Temuan ini menegaskan kembali kuatnya pembagian genre: 'berimbang' di straight news, dan 'tegas menghakimi' di editorial.
Treatment Recommendation (Pola Dominan)	Minim dan implisit di D1, D2, D3, dan D5. Rekomendasi baru muncul secara eksplisit pada D4 dan D6, yang keduanya mengarah pada pelaporan dan intervensi Kemendagri. Orientasi solusinya bersifat reaktif-formal, bukan preventif-struktural. Media ini tidak menawarkan rekomendasi perbaikan mekanisme internal TPK, dialog antarpejabat, ataupun reformasi regulasi jangka panjang.	Menawarkan rekomendasi yang paling komprehensif dan berlapis dalam seluruh corpus: jangka pendek melalui mediasi partai pengusung (K3), jangka menengah melalui intervensi Kemendagri (K2), dan jangka panjang melalui reformasi kelembagaan posisi wabup dalam regulasi (K2, K3). Kompas menjadi satu-satunya media yang mendorong perubahan struktural dan legislatif.	Paling bervariasi karena mengikuti perbedaan genre. SS1 dan SS4 bersifat informatif murni tanpa rekomendasi. SS2 memuat rekomendasi secara tidak langsung melalui kutipan partai pengusung. Sedangkan SS3 (editorial) memberikan tuntutan moral retorik secara langsung kepada kedua pemimpin, alih-alih memberikan rekomendasi institusional. Rekomendasi ini bersifat personal dan bertumpu pada kesadaran etis pemimpin.
Pola Narasumber (Komparatif)	Mimik Idayana sangat dominan secara kumulatif (>20 kutipan lintas 6 berita), namun distribusinya tidak merata (0 kutipan di D3 & D6; sangat dominan di D2 & D4). Bupati Subandi jarang diberi ruang klarifikasi langsung, bahkan 0 kutipan di D6. Secara keseluruhan, tidak ada narasumber pakar independen dalam corpus Detik.	Pakar akademik difungsikan sebagai narasumber dominan atau tunggal di 2 dari 3 berita (Ken Bimo di K2, Abdul Chalik di K3). Analisis akademik sepenuhnya menggantikan kutipan langsung kedua pejabat. Hal ini membuktikan terjadinya depersonalisasi konflik secara radikal, yang diperkuat oleh temuan empiris bahwa Bupati Subandi tidak pernah dikutip langsung (0 kutipan di satu pun dari tiga berita Kompas).	Distribusi narasumber paling beragam dan inklusif: SS1 memuat ketiga pihak (Subandi, Mimik, BKN); SS2 memuat Mimik beserta partai pengusung lokal; SS3 merupakan murni opini redaksi tanpa kutipan wawancara baru; dan SS4 memuat kedua pejabat dengan porsi yang relatif setara. Suara Surabaya menjadi satu-satunya media yang secara langsung menghadirkan suara partai pengusung lokal (Golkar Sidoarjo, Gerindra Jatim).

E. Ringkasan Frame Besar per Media Perbandingan Cepat untuk Bab Pembahasan

Tabel berikut merangkum frame besar masing-masing media dalam format kompak untuk memudahkan penulisan bab Hasil & Pembahasan. Landasan konseptual telah disatukan secara natural ke dalam ringkasan dimensi masing-masing media.

Dimensi	Detik.com	Kompas.com	Suara Surabaya
Frame Utama (Define Problems)	Konflik personal dua individu: 'Bupati Vs Wabup'. Pendekatan ini merupakan bentuk nyata dari komodifikasi konflik melalui jurnalisme episodik.	Kegagalan struktural tata kelola pemerintahan daerah. Isu ditarik dari sentimen pribadi melalui proses depersonalisasi konflik berlandaskan jurnalisme kontekstual.	Ancaman nyata dan terukur terhadap pelayanan publik warga Sidoarjo (eksplisit pada tajuk redaksi). Menegaskan adanya praktik dualitas genre kelembagaan.
Penyebab (Diagnose Causes)	Tindakan mutasi sepihak Bupati Subandi. Redaksi terjebak pada jurnalisme de jure yang menelan klaim elite inkonsisten tanpa verifikasi administrasi.	Koalisi Pilkada rapuh serta kelemahan regulasi UU No. 23/2014. Media ini memanfaatkan otoritas ilmiah untuk memutus siklus perang opini antar-elite.	Kombinasi antara tindakan Bupati, kebuntuan komunikasi birokrasi, serta kegagalan kolektif kedua pemimpin yang disorot tajam melalui kacamata editorial.
Penilaian Moral (Make Moral Judgment)	Secara implisit memihak Mimik akibat dominasi kutipan emosional (kecuali pada D3). Nilai moral tidak konsisten dan hanya bergantung pada akses narasumber.	Sistem politik dan masyarakat diposisikan sebagai subjek utama. Tidak ada figur 'pahlawan' maupun 'penjahat' secara individu.	Berimbang dan netral pada level straight news, namun tegas dan tajam menghakimi kegagalan kedua pihak di level editorial/opini.
Solusi (Treatment Rec.)	Solusi bersifat reaktif-formal dengan mengarahkan eskalasi perseteruan ke tingkat intervensi Kemendagri.	Solusi bersifat struktural berlapis: mediasi parpol pengusung, pengawasan Kemendagri, hingga rekomendasi reformasi perundang-undangan.	Memiliki variasi resolusi: pendekatan normatif via mediasi parpol lokal dan tuntutan retorik yang mengetuk moralitas langsung para pemimpin.
Narasumber Dominan	Mimik Idayana mendominasi kutipan, sementara kehadiran pakar diabaikan. Pemberian ruang bagi klarifikasi Bupati sangat terbatas.	Pakar akademik bertindak sebagai jangkar utama. Bupati Subandi sama sekali tidak mendapat kutipan langsung, mempertegas jarak redaksi dengan elite.	Akses narasumber sangat inklusif mencakup ketiga pihak yang berkonflik, suara partai politik tingkat lokal, dan independensi opini redaksi.

Karakter Pendekatan	Pendekatan episodik-dramatik yang mengejar nilai kecepatan berita, menempatkan konflik administrasi sebagai serial konten perseteruan.	Pendekatan analitis-struktural berbalut jurnalisme kontekstual yang mengedepankan telaah mendalam dari para akademisi.	Pendekatan komunitas-lokal yang menjaga kehati-hatian dalam berita harian, namun tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara normatif di ruang opini.
Implikasi Persepsi Publik	Pembaca cenderung melihat masalah ini sekadar sebagai drama ego personal, sehingga fokus publik teralihkan pada siapa yang salah dan siapa yang benar.	Pembaca diedukasi untuk memandang krisis ini sebagai kegagalan sistem politik lokal, sehingga menumbuhkan tuntutan akan perbaikan institusional.	Pembaca diajak untuk menyadari bahwa konflik ini merupakan kegagalan kepemimpinan daerah yang berdampak kerugian secara langsung pada hak-hak mereka.